

**TINJAUAN YURIDIS
PENYEROBOTAN TANAH MILIK NEGARA OLEH MASYARAKAT
ANALISA KASUS LAHAN ex FPI**

Arief Ferdiansyah¹, Rita Alfiana ,SE,SH,MKn.²
UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA¹
UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA²
bizz83@gmail.com¹
ritalafiana@yahoo.com²

Program Studi: Ilmu Hukum

ABSTRAK

Setelah berlaku UUPA dan khususnya PP 10/61 maka telah terjadi status quo yang artinya tidak mungkin lagi diterbitkan surat-surat keterangan tentang hak-hak seseorang kecuali menerangkan bahwa tanah tertentu memang hak-hak adat. Tanah-tanah yang belum terdaftar atau mengalami kesulitan untuk didaftarkan inilah yang pada umumnya merupakan penyebab utama timbulnya sengketa/masalah pertanahan. Salah satu Kasusistik terkini adalah Polemik yang terjadi antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN VIII) dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah milik mantan pimpinan ex FPI. Dapat dirumuskan permasalahan hukum yang muncul adalah tentang aspek yuridis kedudukan dan aspek yuridis Penggunaan Tanah Milik Negara. Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terdiri dari Bahan-bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari buku-buku, jurnal, dan lain-lain, yang terkait dengan masalah yang dibahas, serta Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer berupa artikel-artikel hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum lainnya, dilanjutkan analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, sedangkan pengolahan data, yang dilakukan dengan cara mengikuti bahan atau buku. Sistematikasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan yang ada, tersebut untuk memudahkan analisis dan merumuskan konstruk atau konsep, dengan Sistematika penulisan terdiri dari bagian awal, isi dan akhir.

Kata Kunci : Aspek Yuridis Kedudukan, Aspek Yuridis Penggunaan, Status Quo

ABSTRACT

After the enactment of the UUPA and especially PP 10/61, a status quo has taken place, meaning that it is no longer possible to issue certificates of a person's rights except to explain that certain lands are indeed customary rights. These lands that have not been registered or have difficulty registering are generally the main causes of land disputes/problems. One of the latest cases is the polemic that occurred between PT Perkebunan Nusantara (PTPN VIII) and the Islamic Markaz Islamic Boarding School (Ponpes) owned by former ex FPI leaders. It can be formulated that the legal issues that arise are regarding the juridical aspect of the position and the juridical aspect of the use of State-Owned Land. The research method in this writing is done through data collection using library research methods by examining library materials or secondary data consisting of primary materials, namely binding materials and consisting of books, journals, and others. other, related to the issues discussed, as well as secondary materials, namely materials that provide explanations of primary materials in the form of articles on research results, or the opinions of other legal experts, followed by a descriptive-qualitative analysis, while data processing, which is done by systematizing materials or books. Systematization means making a classification of existing materials, to facilitate analysis and formulate constructs or concepts, with systematic writing consisting of the beginning, content and end.

Keywords: Juridical Aspects of Position, Juridical Aspects of Use, Status Quo